

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi, di Indonesia sendiri pencapaian kesejahteraan juga merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mensejahterakan secara menyeluruh terus menjadi kajian dikalangan para kebijakan ekonomi. (*Tirto.id com.2020*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun

instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya (Sucipto dan Sutarto, 2015: 136).

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Upaya-upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Permasalahan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warganegara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum sejahtera baik dari aspek ekonomi, kesehatan fisik, dan pendidikan. Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani hidup secara layak dan bermartabat yaitu masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari konsep kesejahteraan sosial Wuryani dan Wahyu, (2012: 149)

Dalam hal ini penanganan dan peran pemerintah sangat besar untuk mengelola wilayah demi mencapainya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam program yang diselenggarakan baik dari pusat sampai ke desa Desa sebagai garda terdepan dalam proses pembangunan, namun keberadaannya justru terkadang dilupakan. Kondisi inilah memperlebar jurang kesenjangan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan lembaga yang bersifat modern dari segi struktur dan landasan hukum untuk melaksanakan pembangunan yang hendak dijalankan oleh pemerintah. Pembangunan Desa. bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa (Fatimah, 2011: 52).

Oleh karena ada banyaknya permasalahan terkait kemiskinan, pemerintah mengembangkan cara pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, keberlanjutan menjadi faktor penting, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan desa.

Dalam hal ini, permasalahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kepuharjo adalah masih kurangnya daya saing masyarakat dalam mempromosikan UMKM. Berdasarkan salah satu sumber, masyarakat Desa Kepuharjo masih belum memiliki akses yang memadai dalam mempromosikan produknya, yang menunjukkan kurangnya partisipasi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (*Adadimalang 13 Mei 2024*),..

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang”. Untuk mengetahui lebih lanjut implementasi kebijakan desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Kepuharjo guna memberikan wawasan dan pemahaman terhadap peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dicantumkan di latar belakang maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan dalam meningkatkan Kesejahteraan?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan desa dalam meningkatkan kesejahteraan.
2. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan faktor penghambat implementasi pengembangan UMKM Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
- 3.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Harapan penulis pada proposal skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan keilmuan dalam bidang administrasi public, khususnya bidang kebijakan publik. Khususnya lagi ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kepuharjo

2. Manfaat Praktis

Harapan penulis dapat dijadikan acuan referensi bagi masyarakat, penulis sendiri, dan mahasiswa. Dengan adanya hal tersebut masyarakat khususnya warga kepuharjo dapat mengetahui implementasi kebijakan desa